

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Gambar II.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi bersamaan dengan digulirkannya Era Otonomi daerah respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat OTONOM, artinya daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, namun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.

Karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, dinas pendidikan provinsi jawa barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut beberapa perubahan baru dan dan penyesuaian dan pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom serta peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah dinas provinsi jawa barat kemudian di sesuaikan kembali dengan ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas pendidikan provinsi jawa barat merupakan penggabungan dari kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional jawa barat yang berkantor di jalan Dr. Radjiman No 06 Bandung dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai dengan kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di Tetapkan Di Jalan Dr. Radjiman No. 06 Bandung.

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

2.1.1.1 Visi

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki sebagai berikut :

"Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa Barat"

2.1.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, perlu dijabarkan menjadi beberapa misi. Adapun misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju.
2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat.
3. Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua.
4. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi.
5. Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK.
6. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat.

2.2. Struktur Organisasi

2.2.1 Pengertian Struktur

Menurut Steers (1984:70) dalam Fianda dkk (2014) menyatakan bahwa struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relative tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2.2.2 Pengertian Organisasi

Menurut Robbins (1996) dalam Yanti (2012) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif, terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

2.2.3 Pengertian Struktur Organisasi

Menurut Ivancevich (2007:235) dalam Fianda dkk (2014) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan rancangan dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompokkelompok tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Gambar II.2 Struktur Organisasi

KEPENGURUSAN:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Jln. Dr. Rajiman No. 6 Bandung, 40171



- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- c. Subbagian Perencanaan dan Laporan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
- d. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
- e. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- f. Seksi Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-LK), Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.
- g. Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMK.

- h. Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.
- i. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Penulis mendapatkan kesempatan melakukan Kerja Praktek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan pengalaman yang cukup bermanfaat dan menarik. Selama melaksanakan Kerja Praktek penulis diberikan kesempatan ditempatkan dibagian dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penulis dapat mengetahui lebih jauh mengenai proses berjalannya pekerjaan bidang dikmen yang bergerak di Instansi Pemerintahan seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini.

Waktu KP yang diikuti penulis yaitu kurang lebih selama 4 minggu dimulai pada tanggal 06 Agustus – 04 September 2018 pada pukul 7.30 s/d selesai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terhitung masa kerja dari hari Senin s/d Jum'at. Di tiap hari kerja, penulis mulai mencari informasi mengenai Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, mengumpulkan informasi tersebut kedalam arsip internal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan hingga membantu membuat serta menyusun tugas – tugas pekerjaan di bidang dikmen.

Dalam melakukan kegiatan kerja praktek penulis dihadapkan pada dua jenis kegiatan, salah satunya kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan setiap hari kerja. Contoh kegiatan rutin tersebut ialah seperti apel pagi serta membantu membuat dan menyusun program pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing sebagai tugas rutin.

Selain kegiatan rutin penulis juga melaksanakan kegiatan Insidental. Kegiatan ini dikerjakan sewaktu-waktu jika ada kepentingan perusahaan yang mendesak untuk segera dilakukan dan diselesaikan. Kegiatan ini mencakup kegiatan pengenalan lingkungan tempat KP yang dilakukan oleh penulis, mencari data untuk laporan KP, dan mencari data mengenai hal yang menyangkut bidang Dikmen.